

PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PADA EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PLATFORM SIPD DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA)

Nadya Intan Kumalasari

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
nadyaintan.19074@mhs.unesa.ac.id

Eva Hany Fanida

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
evafanida@unesa.ac.id

Abstrak

Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran nasional masih menjadi perhatian utama. Pemerintah mengadopsi sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD merupakan salah satu inovasi Kementerian Dalam Negeri yang memiliki berbagai fitur untuk memudahkan pekerjaan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, seperti kurangnya pemahaman pengguna atau operator saat menggunakan aplikasi, jaringan internet dan server SIPD yang masih sering error dan minimnya bimbingan teknis terkait penggunaan SIPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan terkait efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori keberhasilan sistem informasi (2016) oleh William H. Delone dan Ephraim R. McLean mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dapat dikatakan cukup baik dan efektif. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan, yaitu sistem belum sepenuhnya dapat diandalkan karena sering mengalami kendala dan error selama proses penganggaran. Selain itu, kinerja server yang belum optimal juga menjadi hambatan yang mengganggu kelancaran aktivitas pengguna dan waktu respons dari sistem yang masih belum memuaskan.

Kata Kunci: *E-Government*, Efektivitas, SIPD, Penganggaran.

Abstract

Problems in national planning and budgeting are still a major concern. The government adopts a management information system to improve the efficiency and effectiveness of local government implementation, namely the Local Government Information System (SIPD). SIPD is one of the innovations of the Ministry of Home Affairs which has various features to facilitate work in the field of regional financial management. However, in the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) there are still a number of problems faced by the Regional Government of Yogyakarta City, especially in the Investment Office and One-Stop Integrated Services of Yogyakarta City, such as the lack of understanding of users or operators when using applications, internet networks and SIPD servers which are still often errors and lack of technical guidance related to the use of SIPD. This study aims to determine and describe the effectiveness of the Local Government Information System (SIPD) in budget planning at the Investment Office and One-Stop Integrated Services of Yogyakarta City. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The focus of research using the theory of success of information systems (2016) by William H. Delone and Ephraim R. McLean includes system quality, information quality, service quality, use, user satisfaction and net benefits. The results of this study show that the use of the SIPD application in the Investment Office and One-Stop Integrated Services of Yogyakarta City can be said to be quite good and effective. However, there are still some shortcomings, namely the system is not fully reliable because it often experiences problems and errors during the budgeting process. In addition, server performance that is not optimal is also an obstacle that interferes with the smooth running of user activities and response time from the system that is still not satisfactory.

Keywords: *E-Government*, Effectiveness, SIPD, Budgeting.

PENDAHULUAN

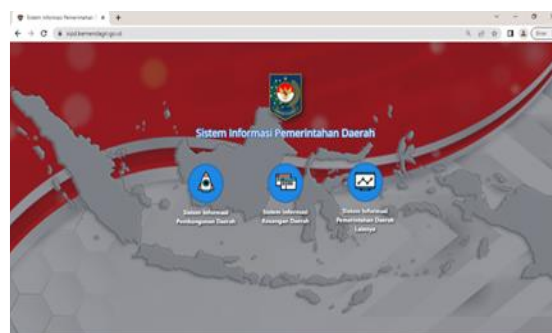
Memasuki era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi dan informasi telah mengalami perkembangan dengan sangat cepat dan memberikan berbagai kemudahan kepada penggunanya. Sebagai penyedia utama layanan publik, pemerintah dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan publik yang diselenggarakan menjadi lebih sederhana, efektif, efisien dan *uptodate* (Nisa, 2016). Salah satu komitmen pemerintah dalam hal ini adalah melalui inovasi *e-government* (Riskika & Meirinawati, 2022). *E-Government* ialah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan efektif, efisien, dan transparan (Twizeyimana & Andersson, 2019). Implementasi *e-government* dimulai dari penyediaan informasi dan data digital mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai wujud transparansi dalam pelayanan publik (Syafriyani & Zaituna, 2018). Keberadaan *e-government* juga diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), salah satu aspek penting dari *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, akuntabel, efisien dan efektif.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, penting bagi pemerintah untuk mengelola keuangan dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mbipi, 2021). Pengelolaan keuangan daerah melibatkan proses perencanaan dan penganggaran yang sangat penting dalam mencerminkan efektivitas penyelenggaraan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara elektronik dapat secara signifikan mengurangi waktu penyusunan dan biaya karena terintegrasi satu sama lain mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan (Prayoga & Yuhertiana, 2021). Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, ditekankan bahwa perencanaan pembangunan harus sejalan dengan penganggaran.

Perencanaan dan penganggaran adalah tahapan krusial dalam tata kelola pemerintahan karena berhubungan dengan tujuan utama pemerintah, yakni memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Proses penganggaran di dalam organisasi sektor publik dimulai setelah strategi dan perencanaan selesai dirumuskan. Anggaran merupakan hasil dari tahapan-tahapan perumusan strategi dan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan ini menjadi penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berfokus

terhadap pencapaian kinerja dapat menghambat pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Efektivitas anggaran sangat mempengaruhi kinerja pemerintah, dimana kinerja pemerintah dianggap baik jika pemerintah berhasil mengelola belanja dengan efektif dan mengalokasikannya secara tepat untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang saling berkaitan, karena penganggaran merupakan hasil dari perencanaan. Dalam perspektif manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan dalam memenuhi fungsi manajemen (Yuwono dkk., 2008:67).

Mengutip dari laporan Kementerian Dalam Negeri permasalahan utama dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional saat ini terletak pada ketidaktersediaan informasi data perencanaan pembangunan yang akurat, perencanaan pembangunan tidak tepat sasaran, belum adanya keselarasan antara data perencanaan dan penganggaran, serta banyaknya variasi aplikasi perencanaan dan keuangan di setiap daerah yang sulit untuk diintegrasikannya sehingga menyebabkan kurangnya efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran (Kemendagri, 2019). Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah mengadopsi sistem informasi manajemen sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran yang dikenal sebagai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).



Gambar 1. Tampilan Website SIPD

Sumber : sipd.kemendagri.go.id

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai sebuah *platform* yang mengintegrasikan informasi terkait pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan daerah lainnya. SIPD berfungsi sebagai alat untuk mendokumentasi, mengadministrasikan dan mengolah data pembangunan daerah, keuangan daerah dan aspek pemerintahan lainnya. Tujuan utamanya adalah menyajikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan penerbitan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/736/SJ yang mengatur Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah di seluruh Indonesia diwajibkan untuk memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam menyediakan informasi tentang pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berfungsi sebagai sarana utama dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melibatkan berbagai instansi dengan peran dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan Permendagri fungsi-fungsi aplikasi SIPD dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1. Pemetaan Fungsi SIPD

KEMENDAGRI	PEMBANGUNAN DAERAH	KEUANGAN DAERAH	PROVINSI	KAB/KOTA
1. Kendali Aplikasi Nasional	1. Database Perencanaan Nasional	1. Database Penganggaran Daerah	1. Database Perencanaan Provinsi	1. Database Perencanaan Kab/Kota
2. Kendali Data Perencanaan, Anggaran dan Referensi Nasional	2. Database Perencanaan Daerah 3. Referensi Urusan, Program dan Kegiatan	2. Referensi Kode dan Nomenklatur Akun Neraca, LRA Dan LO Daerah 3. Referensi Kode SKPD	2. Database Referensi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi 3. Database Referensi Standar Satuan Harga Daerah	2. Database Referensi Perencanaan dan Penganggaran Kab/Kota 3. Database Referensi Standar Satuan Harga Daerah
3. Dashboard Perencanaan dan Keuangan Daerah	4. Evaluasi RPJMD dan RKPD 5. Dashboard Perencanaan Daerah	4. Referensi Kode dan Nomenklatur Sumber Pendanaan 5. Dashboard Penganggaran Daerah 6. Evaluasi RAPBD	4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja dan RKPD) 5. Penyusunan KUA dan PFAS Provinsi 6. Penyusunan APBD Provinsi	4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja dan RKPD) 5. Penyusunan KUA dan PFAS Kab/Kota 6. Penyusunan APBD Kab/Kota
4. Analisa Eksekutif			7. Evaluasi RKPD dan RAPBD Kab/Kota	

Sumber: Kemendagri (2019)

Dari tabel yang telah dijabarkan diatas, terlihat bahwa fungsi-fungsi aplikasi SIPD terbagi di antara beberapa instansi terkait, pembagian fungsi tersebut disesuaikan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai *platform* untuk mengelolah keuangan daerah.

Namun penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di DPMPTSP Kota Yogyakarta tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa kendala masih sering terjadi, seperti gangguan jaringan internet dan server yang sering muncul dalam penggunaan SIPD. Selain itu, masih banyak pengguna atau operator yang belum mengerti atau paham dalam menggunakan aplikasi SIPD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Patricia Anggit Sri Harsono selaku Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan DPMPTSP Kota Yogyakarta :

“Kalau kendala dalam penerapannya sendiri, jaringan internet dan server SIPD masih sering error karena penggunaan yang overload sehingga membutuhkan waktu lama untuk melakukan input data perencanaan maupun penganggaran dan masih ada beberapa pengguna yang masih belum mengerti cara menggunakan aplikasi SIPD”(Wawancara pada tanggal 29 September 2022)

Selanjutnya kendala lain yang dihadapi ialah minimnya bimbingan teknis SIPD, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman pengguna atau operator dalam menggunakan aplikasi SIPD. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu pegawai DPMPTSP Kota Yogyakarta yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yakni Bapak Anans Boga Titra Gutama, berikut kutipan wawancaranya :

“Kendala yang dialami dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sekarang ini masih minimnya bimbingan teknis untuk mengoperasikan aplikasi SIPD. Karena aplikasi ini masih tergolong baru, jadi memang masih terasa asing buat kita”(Wawancara pada tanggal 07 Oktober 2022)

Dari kutipan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dimana jaringan internet dan server SIPD masih sering error, kurangnya pemahaman pengguna atau operator dalam mengoperasikan aplikasi SIPD dan minimnya bimbingan teknis terkait SIPD sehingga menghambat aktivitas perencanaan anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, hal tersebut menjadi *urgent* karena berkaitan dengan perencanaan anggaran. Sebagaimana diketahui, pengelolaan data keuangan sudah menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mencegah kemungkinan terjadinya peristiwa negatif atau penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggaraan keuangan daerah dan menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Atas dasar latar belakang dan temuan permasalahan tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi tersebut didasari pada fakta bahwa Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dengan menggunakan indikator keberhasilan sistem informasi yang diusulkan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean (2016) yang meliputi Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Penggunaan, Kepuasan Pengguna, Manfaat Bersih. Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018) mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mempunyai peranan penting dalam menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. SIPD bertujuan untuk menciptakan layanan informasi yang terintegrasi dan saling terhubung untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan dan pengelolaan data keuangan daerah, dengan salah satu tujuan utamanya adalah pencegahan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Aplikasi SIPD berfungsi sebagai alat pendukung dalam kegiatan dokumentasi, administrasi, dan pengelolaan data keuangan daerah yang inovatif dan berkualitas untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai *platform* untuk mengelolah keuangan daerah. Sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dapat dikatakan efektif apabila terjadi interaksi antara pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat. Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Panjaitan, 2021). Efektivitas sistem informasi dapat dilihat setelah sistem beroperasi dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan analisis pasca-implementasi untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Merujuk pada hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti,

maka dapat dilakukan analisis mengenai efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dengan menggunakan enam indikator keberhasilan sistem informasi menurut William H. DeLone dan Ephraim R. McLean (2016) yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kualitas Sistem

Indikator ini merujuk pada karakteristik yang diharapkan dari suatu sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Menurut DeLone dan McLean (2016), sub indikator kualitas sistem meliputi *ease of learning, ease of use, availability, response time, system reliability, flexibility, system security*.

Menurut Sun dan Zhang (2011), *ease of learn* adalah kondisi di mana individu memiliki keyakinan bahwa mereka dapat dengan mudah mempelajari penggunaan sistem baru. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa SIPD mudah dipelajari oleh pengguna karena tersediannya materi berupa buku panduan dan video tutorial dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) Kota Yogyakarta. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Patricia selaku Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DPMPTSP Kota Yogyakarta :

“Menurut saya mempelajarinya terbilang mudah, kita dapat materinya berupa buku panduan tutorial dan juga disediakan video tutorial yang dibuat oleh BPKAD melalui akun youtube untuk memandu pengguna dalam menggunakan SIPD”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023)

Hal ini sesuai dengan konsep DeLone dan McLean (2003) yang menekankan bahwa kemudahan penggunaan tidak hanya mencakup kemudahan dalam mengoperasikan sistem tetapi juga kemudahan dalam mempelajari sistem dalam mendukung pelaksanaan tugas. Menurut (Wibowo, 2006) *Perceived Ease of use* adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa teknologi dapat dipahami dan digunakan dengan mudah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna atau operator karena sistemnya yang sederhana. Selain itu, kemudahan penggunaan juga didukung dengan adanya bimbingan teknis atau pelatihan yang diberikan pihak pengembang sistem kepada pengguna sistem. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Octaria selaku Pengelola Layanan Operasional DPMPTSP Kota Yogyakarta sebagai berikut :

“Kalau menurutku cara mengoperasikannya mudah ya, kan kita diajarin bagaimana cara menggunakan aplikasi SIPD tersebut. Kalau kita nggak dikasih tau kita juga gatau dan terdapat pembaharuan secara berkala sehingga aplikasinya juga berubah ubah”(Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023)

Dengan demikian, indikator ini telah sesuai dengan kerangka konseptual DeLone dan McLean (2003), bahwa sistem informasi dapat dikatakan berkualitas tinggi jika dibangun untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan penggunaan. Sistem Informasi pemerintahan Daerah (SIPD) ditemukan bahwa dapat diakses ketika dibutuhkan operator atau pengguna dalam melaksanakan tugas yang diperlukan. SIPD memiliki ketersediaan akses selama 24 jam dan memungkinkan akses dari berbagai lokasi. Sistem ini dapat diakses tanpa terbatas oleh jaringan LAN, sehingga memungkinkan pengguna untuk membuka aplikasi SIPD dari rumah atau lokasi lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Wulan selaku Analis Penanaman Modal 2 DPMPTSP Kota Yogyakarta. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :

“Sebenarnya aplikasi SIPD ini sangat memudahkan pengguna atau operator dek, yang pertama karena dapat diakses 24 jam, dan penginputan data penganggaran juga dapat dilakukan dimana saja selama ada koneksi internet”(Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023)”

Aplikasi SIPD memiliki kemudahan dan aksesibilitas yang lebih luas, menciptakan suatu sistem yang lebih efisien dan mendukung proses pengelolaan anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Ketersediaan sistem informasi berdampak positif terhadap pengguna, karena kemudahan akses yang diberikan oleh sistem dapat meningkatkan kinerja pengguna. Dengan demikian, indikator ketersediaan telah terpenuhi oleh SIPD karena tersedia ketika operator membutuhkannya (Bendoly & Swink, 2007). Menurut Bailey dan Pearson (dalam Jogiyanto, 2007:14), waktu respon adalah respon sistem terhadap pengguna dalam memproses informasi. Dalam hal waktu respon, SIPD memiliki kecepatan respon tergantung pada jam-jam tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Patricia selaku Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan DPMPTSP Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa :

“Kalau ini tergantung waktu ya dek, kalau yang perencanaan ini kan kita ngisinya bareng bareng. Jadi kita diberi tenggang atau batas waktu pengisianya untuk semua pemda. Misalnya kalau saat jam jam kantor gini ya lemot dek tetapi kalau jam makan siang atau tengah malem gitu udah agak longgar sistemnya”(Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023)

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Wulan selaku Analis Penanaman Modal 2 DPMPTSP Kota Yogyakarta. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :

“Kalau untuk kecepatan waktu respon SIPD ini

masih lemot ya, kelemahannya itu kan karena kita aksesnya barengan satu Indonesia data nasional, jadinya sistemnya lemot. Terus kita juga sudah diberikan *deadline*, nah diakhir akhir waktu *deadline* habis itu crowded atau ramainya disitu”(Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023)

Pengisian data perencanaan anggaran dalam SIPD dilakukan secara bersamaan oleh semua pemda di Indonesia sehingga menyebabkan sistem menjadi lambat pada saat jam kerja. Batas waktu pengisian data juga mempengaruhi respon SIPD dimana sistem menjadi padat dan sibuk di akhir batas waktu. Namun, SIPD memiliki respon yang baik pada malam hari ketika hanya beberapa OPD yang menggunakannya. Meskipun demikian, secara keseluruhan kecepatan respon SIPD dinilai masih belum optimal. Sebuah sistem informasi dikatakan berkualitas apabila mampu memberikan kecepatan akses yang optimal. Kecepatan akses ini berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem informasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh DeLone dan McLean (2003).

Mohamadali dan Aziz (2017) menegaskan bahwa sistem informasi harus terbebas dari kesalahan dan mampu beroperasi dengan cepat. Keandalan sistem berkaitan dengan atribut kinerja suatu sistem, dimana sistem yang andal harus menunjukkan kinerja yang memuaskan ketika dioperasikan tanpa adanya kesalahan atau malfungsi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih belum dapat diandalkan sepenuhnya. Sistem tersebut masih sering mengalami kendala dan *error* selama proses penganggaran, dimana sistem cenderung mengalami gangguan atau kegagalan (*sistem down*) karena tingginya permintaan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Octaria selaku Pengelola Layanan Operasional DPMPTSP Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa :

“Servernya sering *down* apalagi kalau siang hari. Karena banyak yang pakai, itu pasti entah dalam hitungan jam atau seharian juga pernah error gitu, dengan begitu kita tidak bisa input data pada sistem dan tidak bisa lanjut juga. Jadi nunggu servernya bener baru kita bisa lanjut mengisi data”(Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023)

Gangguan sistem tersebut dapat berlangsung beberapa jam atau bahkan seharian sehingga menghambat proses pengisian data dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada aspek keandalan sistem SIPD, terutama yang terkait dengan pemeliharaan server, peningkatan kapasitas jaringan dan peningkatan kapasitas server. Perbaikan ini diharapkan dapat mengatasi masalah keterlambatan, gangguan dan *error* yang mempengaruhi

pengalaman pengguna dengan sistem. Upaya ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pengguna SIPD di DPMPTSP Kota Yogyakarta.

Menurut Heidmann (2008:87) suatu sistem dianggap fleksibel jika dapat menyesuaikan diri dengan berbagai macam kebutuhan dan tuntutan penggunaan terhadap perubahan yang terjadi di dalam lingkungan organisasi. Dapat diketahui bahwa SIPD telah mampu beradaptasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Fleksibilitas tersebut dapat dilihat dari respon sistem yang cepat ketika pengguna menggunakan fiturnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Monica selaku Analis Iklim Usaha dan Kerjasama DPMPTSP Kota Yogyakarta dalam kutipan wawancara berikut :

“Sistemnya menurut saya sudah berjalan baik dek, dan dapat dikatakan fleksibel karena langsung merespon ketika saya menekan fitur apa itu sudah langsung muncul dan SIPD ini cukup membantu, karena kita sudah tidak melakukan perencanaan secara manual sudah disediakan aplikasi, jadi kita tinggal memasukkan data di sistem tersebut dan semuanya bisa terkontrol”(Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023)

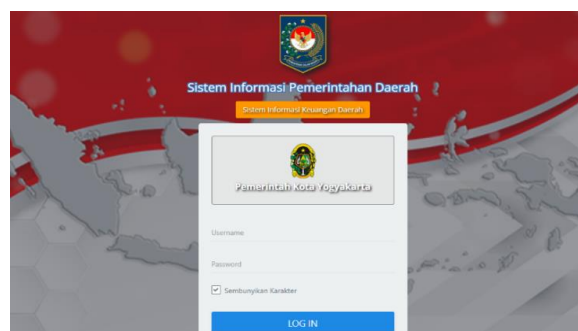
Selain itu, fleksibilitas sistem juga dapat dilihat dengan adanya pembaruan sistem secara rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas dan performa sistem. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Wulan selaku Analis Penanaman Modal 2 DPMPTSP Kota Yogyakarta. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :

“Iya pembaharuan sistem ini selalu dilakukan oleh pemerintah pusat dek, beberapa fiturnya itu baru karena kan sistem dibangun dan dikembangkan untuk perbaikan-perbaikan agar menjadi lebih baik lagi”(Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023)

Dengan demikian, indikator ini telah sesuai dengan teori DeLone dan McLean (2003) yang menjelaskan bahwa fleksibilitas sebagai kemampuan suatu sistem informasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna. Menurut Urbah dan Muller (2011), sistem harus menjaga kerahasiaan data pengguna untuk mencegah akses yang tidak sah. Memastikan keamanan data dalam sistem akan mengurangi resiko penyalahgunaan data oleh pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem yang ada atau yang akan dibangun dilengkapi dengan perlindungan yang menjamin keamanan data. Berdasarkan temuan peneliti, dapat diketahui bahwa keamanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah terbilang baik. Sistem ini hanya bisa diakses oleh pegawai yang memiliki *username* dan *password* yang telah didaftarkan dengan Nomor Induk Pegawai (NIP). SIPD juga

dilengkapi dengan fitur keamanan yang memungkinkan pembukaan dan penutupan akses secara berkala yang bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan sistem. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Patricia Anggit Sri Harsono selaku Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DPMPTSP Kota Yogyakarta :

“Jadi yang bisa akses SIPD itu aturannya adalah PNS yang NIPnya sudah didaftarkan, jadi pemegang NIP walaupun yang buka orangnya juga harus bertanggungjawab. Kalau masalah keamanan aman, karena sistem SIPD sistemnya buka tutup jadi pada saat kita disuruh input atau entry data kita diberi waktu beberapa hari. Setelah itu kita wajib untuk mengoreksi, nah kalau semuanya sudah sesuai kita lapor kepada BPKAD dan sistem otomatis juga akan ditutup. Jadi nggak semua orang bisa mengubah angka disitu”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023)



Gambar 2. Halaman Login SIPD

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

Proses pengolahan data di dalam SIPD dilakukan melalui tahapan yang dijadwalkan, dimana pengguna diberikan jangka waktu beberapa hari untuk melakukan input atau pengisian data. Setelah proses tersebut selesai, sistem secara otomatis akan ditutup untuk mengurangi kemungkinan manipulasi data. Hal ini sesuai dengan konsep DeLone dan McLean (2003) bahwa sistem informasi dianggap baik apabila keamanan sistem tersebut dapat diandalkan dan dipercaya, sehingga data pengguna dapat disimpan dengan aman dalam sistem tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator kualitas sistem telah terpenuhi dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya. Dilihat dari aspek kemudahan penggunaan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki tampilan yang sederhana sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan mengoperasikan sistem tersebut dengan mudah. SIPD memiliki ketersediaan akses selama 24 jam yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem tersebut kapanpun dan dimanapun. SIPD juga memiliki tingkat keamanan yang baik karena pengguna harus memasukkan *username* dan *password* saat mengakses sistem. Namun, dari segi kehandalan sistem, SIPD belum sepenuhnya dapat

diandalkan karena masih mengalami kendala atau *error* pada saat proses penganggaran. Selain itu, dalam hal kecepatan waktu respon, SIPD masih dianggap lambat karena pengisian data dalam sistem dilakukan secara bersamaan oleh seluruh satuan kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan lebih lanjut, terutama pada kondisi server untuk memastikan kelancaran penggunaan sistem.

2. Kualitas Informasi

Menurut DeLone dan McLean (2003), kualitas informasi diartikan sebagai karakteristik yang diharapkan dari hasil keluran (*output*) suatu sistem informasi. Dimensi ini berfokus pada kualitas informasi yang dihasilkan sistem dan kegunaannya bagi pengguna. Sehingga dalam dimensi ini dapat diketahui apakah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah menghasilkan informasi yang baik dan layak sebagai sistem informasi. Indikator kualitas informasi meliputi relevan, dapat dimengerti, akurat, keterkinian, serta kelengkapan.

Informasi yang disediakan oleh suatu sistem informasi dianggap berkualitas tinggi relevan dengan kebutuhan penggunaannya atau bermanfaat bagi mereka (Leonardo, 2015). Relevansi ini berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menyampaikan informasi yang selaras dengan kebutuhan pengguna. Kebermanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem ditentukan oleh tingkat relevansinya dengan kebutuhan pengguna. Dapat diketahui bahwa informasi yang ada pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah sesuai dengan kebutuhan operator sebagai pengguna. Hal ini terlihat dari ketersediaan seluruh data dan informasi yang relevan di dalam SIPD. Informasi tersebut mencakup seluruh tahapan penganggaran, mulai dari rancangan awal hingga rancangan akhir yang telah diperwalkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Patricia selaku Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DPMPTSP Kota Yogyakarta :

“Iya tentu relevan dek, sistem penganggaran itu prosesnya panjang, karena anggaran tahun depan saja sudah mulai kita hitung dari bulan februari tahun sebelumnya dan nanti diperwalkannya masih sekitar akhir tahun atau awal tahun berikutnya. Karena dalam proses perencanaan anggaran di pemerintahan itu harus fleksibel dan luwes tetapi juga harus penuh dengan kehati-hatian. Biasanya dari rancangan pertama sampai rancangan akhir terbit akan ada sedikit perbedaan berdasarkan saran-saran dan masukan yang telah diberikan. Nah, seluruh proses ini nanti akan terangkum dalam SIPD. Jadi mulai dari rancangan awal hingga rancangan akhir yang sudah diperwalkan semua tersedia dalam SIPD”(Wawancara pada tanggal

12 Mei 2023)

Adanya data yang komprehensif, pengguna dapat menggunakan SIPD sebagai panduan yang efektif dalam proses penganggaran. Sebagaimana dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003), kualitas informasi yang diberikan oleh sebuah sistem dianggap baik ketika informasi tersebut relevan dengan kebutuhan pengguna atau memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna. Suatu informasi dapat dimengerti oleh pengguna jika dapat dilihat dengan baik dan mudah untuk dipahami oleh pengguna sistem informasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengguna dapat dengan mudah memahami informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Informan mengungkapkan bahwa antarmuka aplikasi SIPD dinilai baik dan sederhana sehingga membantu pengguna dalam memahami informasi yang disajikan oleh sistem.



Gambar 3. Tampilan SIPD

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

Informasi yang disajikan dalam SIPD juga disusun secara terstruktur dan jelas sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang diatur dalam Peraturan Walikota. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Monica selaku Analis Iklim Usaha dan Kerja Sama DPMPTSP Kota Yogyakarta bahwa :

“Menurutku informasinya mudah dimengerti atau diterima, karena informasinya sudah jelas dan terangkum dalam sistem prosedur (SOP) yang ada di perwal, sehingga aplikasinya menyesuaikan perwalnya”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023)

Konsistensi antara aplikasi dan peraturan tersebut dapat menjamin kualitas dan kejelasan informasi sehingga dapat mempermudah pemahaman pengguna. Hal ini sesuai dengan konsep DeLone dan McLean (2003) dimana penyajian informasi secara tepat akan meningkatkan kualitas informasi dan mempermudah pengguna dalam memahaminya.

Keakuratan informasi menjadi aspek penting dalam proses pelayanan dan penyampaian informasi. Akurat menunjukkan bahwa informasi yang dibutuhkan pengguna harus bebas dari kesalahan serta tidak bersifat bias atau menyesatkan (Zunaidi, dkk., 2011). Dapat diketahui bahwa informasi yang terdapat dalam SIPD

dapat dipercaya, valid dan akurat. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Patricia selaku Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DPMPTSP Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa :

“Tentu akurat dek, karena ini kan menyangkut perencanaan anggaran di lingkungan dinas, jadi penting untuk kita memastikan bahwa setiap rincian anggaran tercatat dengan tepat dan benar dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Karena hal ini nantinya juga akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan di dalam dinas”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023)

Data yang ada di SIPD merupakan keluaran dari Kementerian Dalam Negeri yang dapat diverifikasi kebenarannya. Aplikasi SIPD memiliki akses yang terbatas sehingga memberikan perlindungan terhadap risiko terjadinya penyimpangan data yang dapat berdampak pada proses perencanaan anggaran. Keakuratan data dalam sistem terjamin karena setelah proses input data berakhir, informasi tersebut otomatis terkunci dari pusat sehingga mencegah adanya manipulasi atau perubahan data sembarangan. Hal ini sejalan dengan DeLone dan McLean (2003) yang menekankan bahwa informasi dalam sebuah sistem informasi dianggap akurat jika benar dan tidak menyimpang atau menyesatkan penggunanya.

Keterkinian artinya informasi yang dihasilkan oleh sistem merupakan informasi terkini dan selalu diperbarui. Dalam temuan peneliti, diketahui bahwa informasi yang ada dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan informasi terkini. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang mengatakan bahwa terdapat ketidakpastian pada saat proses perencanaan anggaran. Pengisian anggaran dalam SIPD tidak dilakukan satu kali, tetapi dapat dilakukan beberapa kali karena anggaran dapat mengalami perubahan atau pergeseran setiap saat. Oleh karena itu, informasi akan diperbarui berulang kali untuk memastikan keakuratan dan relevansinya. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa informasi yang ditampilkan dalam SIPD merupakan data yang paling baru dan terkini.

Kelengkapan diartikan bahwa informasi yang ada pada sistem sudah lengkap. Dapat diketahui bahwa, informasi yang disediakan aplikasi SIPD sudah memenuhi kebutuhan pengguna. SIPD memberikan informasi lengkap mengenai proses penganggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga output dan indikator yang digunakan. Bailey dan Pearson (2007) berpendapat bahwa informasi yang lengkap berarti informasi yang dapat memenuhi semua keperluan pengguna sistem. Informasi yang tersedia dalam SIPD dinilai cukup untuk dijadikan referensi data anggaran dan perencanaan anggaran. Oleh karena itu, SIPD dapat menjadi sumber

referensi untuk pekerjaan yang memerlukan data terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kualitas informasi telah terpenuhi dengan baik. SIPD telah memberikan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Informasi tersebut mencakup tahap perencanaan, perubahan atau pergeseran anggaran hingga *output* dan indikator yang digunakan. Tampilan SIPD yang sederhana dianggap dapat membantu pengguna dalam memahami informasi yang tersedia. Dari segi akurasi, informasi yang dihasilkan aplikasi SIPD dianggap akurat, lengkap dan dapat dipercaya. Selain itu, informasi dalam SIPD juga selalu diperbarui secara teratur untuk memastikan keakuratan dan relevansinya.

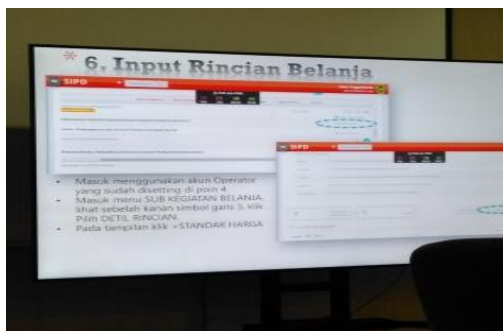
3. Kualitas Layanan

Menurut DeLone dan McLean (2016) kualitas layanan merupakan kualitas dukungan yang diterima pengguna sistem dari bagian organisasi sistem informasi atau departemen yang bertanggung jawab terhadap sistem. Indikator dalam dimensi ini meliputi *reliability, empathy, dan responsiveness*

Menurut Tjiptono (2018), keandalan mengacu pada kemampuan menyediakan layanan yang dijanjikan dengan cepat, akurat, dan memuaskan. Temuan peneliti menunjukkan bahwa pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta sebagai penyedia sistem telah memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna atau operator karena dapat menyelesaikan permasalahan terkait sistem secara efektif. Selain itu, operator SIPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIPD) Kota Yogyakarta sebagai pengguna sistem juga telah memiliki kemampuan yang baik. Dalam hal ini kemampuan operator sudah terlihat mampu dan handal dalam menggunakan SIPD. Pengguna atau operator mendapat pelatihan atau bimbingan teknis sebelum memasukkan data ke dalam sistem. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wulan selaku Analis Penanaman Modal 2 DPMPTSP Kota Yogyakarta, dalam kutipan wawancara berikut :

“Sebenarnya pada saat kita akan melakukan input atau *entry* data perencanaan ke dalam aplikasi SIPD kita mendapatkan bimbingan teknis dari Bappeda, BPKAD, PEP atau bagian perencanaan dinas dan kita juga ada rapat koordinasi (rakor) persiapan, bimbingan teknis secara langsung pengisiannya ini maksudnya apa lalu ini harus diisi apa begitu dek”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023)

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna memiliki pemahaman yang baik tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan data dalam SIPD. Selain itu, pengguna juga mendapatkan *soft file* atau *manual book* dan video tutorial penggunaan SIPD yang disediakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta.



Gambar 4. Bimtek Internal DPMPTSP Kota Yogyakarta

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

Menurut (Warsono dkk., 2018), empati merupakan kemampuan untuk membentuk interaksi komunikasi yang baik, dengan memberi perhatian dan memahami kebutuhan individu pengguna sistem. Dapat diketahui bahwa pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta telah menunjukkan empati yang baik. Hal ini didasari oleh respon positif dari pihak BPKAD ketika diminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan sistem, dimana mereka menunjukkan kesediaan untuk memberikan bantuan dan bekerja sama dengan pengguna dalam mengatasi permasalahan yang muncul terkait dengan sistem. Sebagaimana dijelaskan oleh Mbak Pinastika selaku Analis Data dan Informasi DPMPTSP Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa :

“Wah, kalau pihak BPKAD sendiri melayani dengan sangat ramah dan sabar dek, setiap kita ada keluhan ataupun pertanyaan pasti langsung ditanggapi dengan cepat. Mereka juga teliti dalam memeriksa masalah atau gangguan pada sistem dan mereka juga memberikan informasi dengan jelas sehingga mudah kita pahami” (Wawancara pada tanggal 08 Mei 2023)

Selain itu, sikap perhatian akan pengguna yang ditunjukkan pihak BPKAD juga dijelaskan oleh Ibu Monica selaku Analis Iklim Usaha dan Kerjasama DPMPTSP Kota Yogyakarta. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :

“Kita biasanya juga ada sosialisasi dari BPKAD dek, di situ kita bisa diskusikan permasalahan atau kendala yang muncul dalam penggunaan SIPD. Selain itu, kalau ada perubahan pada sistem biasanya juga diinformasikan lewat sosialisasi tersebut” (Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta juga melakukan sosialisasi dengan operator SIPD sebagai bentuk kepedulian terhadap operator. Sosialisasi memberikan kesempatan kepada instansi untuk mendiskusikan permasalahan atau hambatan dalam penggunaan SIPD. Terkait sub

indikator daya tanggap dapat diketahui bahwa pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki kecepatan respon yang baik dalam menanggapi keluhan dan pertanyaan terkait sistem. Hal ini juga didukung dengan adanya grup WhatsApp antara operator DPMPTSP Kota Yogyakarta dengan pihak BPKAD Kota Yogyakarta.



Gambar 5. Group Operator SIPD

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

Adanya grup WhatsApp antara operator DPMPTSP Kota Yogyakarta dengan pihak BPKAD memungkinkan penyelesaian masalah dilakukan dengan cepat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Monica selaku Analis Iklim Usaha dan Kerjasama DPMPTSP Kota Yogyakarta. Berikut kutipan wawancaranya :

“Responnya di grup itu sudah bagus dek, apabila ada keluhan terkait aplikasinya kita langsung sampaikan dan mereka langsung menanggapi. Terlebih lagi sudah ada petugas yang jelas untuk menangani permasalahan mengenai sistem, nanti arahan yang mereka berikan kita jalankan sesuai dengan prosedur”(Wawancara pada tanggal 24 Februari 2023)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kualitas layanan telah terpenuhi dengan baik. Aspek kehandalan telah terpenuhi dengan baik, operator SIPD telah memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem. Hal ini dikarenakan pihak penanggungjawab SIPD DPMPTSP Kota Yogyakarta secara teratur memberikan pelatihan atau bimtek internal kepada operator sebelum melakukan input data ke dalam sistem. Dalam hal empati, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menunjukkan kesediaan untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan permasalahan atau kendala terkait sistem. Operator BPKAD juga menunjukkan kecepatan respon yang baik dalam menanggapi keluhan dan pertanyaan terkait sistem. Adanya grup WhatsApp antara operator DPMPTSP Kota Yogyakarta dengan pihak BPKAD juga membantu penyelesaian masalah dilakukan dengan cepat

4. Penggunaan

Penggunaan adalah tingkat dan bagaimana pengguna memanfaatkan fitur yang disediakan oleh suatu sistem informasi (DeLone & McLean, 2016). Dalam kerangka keberhasilan sistem informasi yang diajukan oleh DeLone

dan McLean (2003), dimensi minat untuk menggunakan (*intention to use*) direkomendasikan sebagai opsi pengganti untuk dimensi penggunaan (*use*). Meskipun D&M IS Success Model oleh DeLone dan McLean telah diterapkan secara luas dalam berbagai penelitian empiris untuk menjelaskan keberhasilan sistem informasi, namun model ini lebih cocok digunakan dalam konteks penggunaan sistem informasi yang bersifat sukarela. Sebagai jenis sistem yang diwajibkan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak memungkinkan untuk menggunakan variabel penggunaan (*use*) dalam kerangka model DeLone dan McLean sebagai indikator keberhasilan sistem informasi. Karena itu, peneliti menggunakan indikator dari dimensi penggunaan yang diadopsi oleh Livari (2005) untuk melakukan penelitian terhadap sistem informasi yang wajib digunakan dalam sektor publik. Sub indikator yang digunakan ialah frekuensi penggunaan dan penggunaan harian

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, frekuensi penggunaan Aplikasi SIPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta digunakan cukup rutin setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan pernyataan informan yang menyatakan bahwa proses pengisian anggaran tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan anggaran mengalami perubahan atau pergeseran setiap waktu. Selain itu, SIPD memiliki peran penting sebagai alat utama untuk memantau anggaran, mengakomodasi usulan perubahan atau pergeseran anggaran dan melakukan rekonsiliasi. Namun, frekuensi penggunaan SIPD tidak bersifat tetap melainkan dapat bervariasi dari satu hingga beberapa kali dalam setahun tergantung pada dinamika perubahan anggaran yang terjadi. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sendiri, SIPD digunakan dalam proses *entry* atau input data anggaran. Penggunaan harian sistem berkisar antara 1-2 jam atau sejumlah jam kerja. Hal ini bergantung pada volume data yang akan diinput dan kemampuan pengguna dalam menggunakan sistem. Volume data yang cukup besar terkadang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan dalam satu hari, sehingga input data dapat dilanjutkan pada hari berikutnya

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, indikator penggunaan SIPD telah terpenuhi dengan baik. SIPD digunakan secara rutin dalam proses penganggaran setiap tahunnya. Frekuensi penggunaannya dapat bervariasi dari satu hingga beberapa kali dalam setahun bergantung pada dinamika perubahan anggaran yang terjadi. Secara harian, perkiraan waktu penggunaan SIPD berkisar antara 1-2 jam tergantung pada volume data yang diinput dan tingkat pemahaman pengguna terhadap aplikasi atau sistem tersebut.

5. Kepuasan Pengguna

Menurut DeLone dan McLean (2016), kepuasan

pengguna merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan pengguna mengenai penggunaan sistem informasi dalam hal laporan yang dihasilkan, situs web, aplikasi, dan layanan dukungan. Kepuasan pengguna memiliki peran penting dalam mengetahui respons pengguna sistem terhadap sistem informasi yang sedang digunakan. Kepuasan penggunaan yang diinginkan mengacu pada kepuasan pengguna secara menyeluruh terhadap kualitas sistem dan kualitas informasi.

Terkait kepuasan terhadap sistem, dapat disimpulkan bahwa pengguna sistem sudah merasa cukup puas dengan kinerja sistem. Hal ini dapat dilihat bahwa aplikasi SIPD memudahkan proses perencanaan anggaran, dimana proses perencanaan tidak lagi dilakukan secara manual melainkan menjadi terstruktur dan terorganisir dalam sistem. Hal ini akan meningkatkan transparansi kegiatan perencanaan anggaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Patricia selaku Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan DPMPPTSP Kota Yogyakarta :

“Kalau aku cukup puas ya dek, karena dengan adanya SIPD ini perencanaan jadi lebih mudah soalnya udah gak manual lagi, terus lebih terstruktur juga dan tersistematis jadinya kegiatan perencanaan anggaran juga menjadi lebih transparan”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023)

Namun, masih terdapat pengguna yang belum sepenuhnya puas terhadap kondisi server SIPD. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan yang menyatakan bahwa SIPD masih sering mengalami error, terutama pada saat memasukkan data mendekati tenggang waktu terakhir. Keadaan ini menyebabkan sistem menjadi padat atau ramai, dimana data tidak tersimpan dengan baik dan pengguna terpaksa berulang kali memasukkan data ke dalam SIPD. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Wulan selaku Analis Penanaman Modal 2 DPMPPTSP Kota Yogyakarta, berikut kutipan wawancaranya :

“Kalau sistemnya bisa stabil dan gak *down* itu sangat membantu mbak, cuma memang servernya belum terlalu memadai. Masih sering eror, ketika kita entry di waktu-waktu terakhir itu pasti sistemnya *crowded* dan itu menyebabkan data yg kita input tidak tersimpan jadi kita harus mengulang untuk memasukan data ke dalam SIPD”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023)

Kepuasan pengguna, juga dapat dinilai berdasarkan kepuasan terhadap informasi yang dihasilkan oleh sistem. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa informasi yang diberikan oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah memenuhi kebutuhan pengguna karena karena mencakup seluruh tahapan proses penganggaran, mulai dari rancangan awal, perubahan hingga rancangan akhir yang telah

disusun. Pengguna telah merasa puas dengan informasi yang disediakan oleh SIPD karena informasi tersebut disampaikan dengan lengkap, mudah dipahami dan bermanfaat dalam pengelolaan anggaran dan proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mas Hafiz selaku Analis Dokumen Perizinan DPMPTSP Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa :

“Untuk kepuasan informasi dari sistem saya sudah cukup puas ya dek karena sudah lengkap mulai dari rancangan awal, terus perubahan perubahan sampai rancangan akhir yang sudah diperwalkan semuanya sudah terekam dalam SIPD dan nantinya data atau informasi yang dihasilkan dapat kita gunakan sebagai pedoman atau pegangan dalam penggunaan anggaran di lingkungan dinas”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023)

Semua informasi tersebut tercatat secara terperinci dalam SIPD sehingga data dan informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam pelaksanaan anggaran di dinas. Terlebih lagi, laporan yang dihasilkan melalui aplikasi SIPD dapat diakses dengan mudah dan memperlihatkan hasil perencanaan anggaran secara jelas dan transparan. Kualitas informasi yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna (Delone & McLean, 2003).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kepuasan pengguna cukup terpenuhi dengan baik. Pengguna telah merasa puas dengan kinerja SIPD. Namun, masih terdapat pengguna yang belum sepenuhnya puas dengan kondisi server SIPD yang masih mengalami beberapa masalah yang mengganggu aktivitas penganggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas server SIPD. Dalam hal kepuasan informasi, pengguna juga sudah merasa puas dengan informasi yang ada dalam aplikasi SIPD, karena informasi yang dihasilkan mudah untuk dipahami, lengkap, dan berguna dalam proses penganggaran.

6. Manfaat Bersih

Manfaat bersih merupakan hasil dari keberadaan dan pemanfaatan sistem informasi yang dapat dinikmati oleh individu atau organisasi yang memanfaatkannya. Manfaat bersih dipertimbangkan karena sistem informasi dapat memberikan dampak yang signifikan tidak hanya pada tingkat individu atau organisasi, namun juga pada masyarakat dan antar organisasi. Oleh karena itu, manfaat bersih menjadi variabel yang tepat untuk menentukan tingkat keberhasilan penerapan sistem informasi (DeLone & McLean, 2016). Sub indikator dalam indikator ini adalah produktivitas dan efisiensi yang mencakup manfaat yang diperoleh oleh pengguna melalui penerapan SIPD.

Menurut Sinungan (2014) produktivitas adalah

perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan seluruh sumber daya yang digunakan (*input*). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah berhasil meningkatkan produktivitas dari pengguna. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Mira selaku Analis Penanaman Modal 1 DPMPTSP Kota Yogyakarta yang menyatakan bahwa :

“Adanya aplikasi SIPD sekarang ini mengubah proses perencanaan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi online. Hal ini membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pada manusia (*human error*). Selain itu, perubahan ini membantu mempercepat proses penginputan data perencanaan dan membantu pekerjaan kita selesai dengan cepat”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023)

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ibu Octaria selaku Pengelola Layanan Operasional DPMPTSP Kota Yogyakarta. Berikut kutipan wawancaranya:

“Aplikasi SIPD memberikan banyak manfaat dek, sekarang kita dapat dengan mudah memasukkan data perencanaan anggaran, selain itu kita juga bisa melaporkannya dengan cepat karena semuanya sudah masuk ke dalam sistem, dampaknya juga pekerjaan kita menjadi cepat selesai”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023)

Fitur-fitur dan menu-menu yang ditawarkan oleh SIPD telah membantu mempermudah pelaksanaan tugas pengguna. Selain itu, SIPD juga memberikan banyak manfaat dalam proses perencanaan anggaran. Pengguna dapat dengan mudah menginput data perencanaan anggaran dan melaporkannya dengan cepat karena semua informasi telah terintegrasi dalam sistem. Kesederhanaan dan kecepatan proses SIPD menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran. Dengan demikian, penerapan SIPD telah berhasil dalam mengoptimalkan proses penganggaran dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Terkait efisiensi, ditemukan bahwa penggunaan aplikasi SIPD mampu memaksimalkan kegiatan perencanaan anggaran dengan mengurangi mobilitas, biaya dan waktu. Melalui penerapan SIPD, proses perencanaan telah terintegrasi ke dalam sistem dan tidak lagi dilakukan secara manual. Pengguna dapat mengelola seluruh proses secara lebih efisien hanya dengan memasukkan data ke dalam sistem. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Patricia selaku Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan DPMPTSP Kota Yogyakarta. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :

“Adanya aplikasi SIPD ini sangat bermanfaat dek, lebih hemat dalam biaya dan juga waktu,

karena kita sudah tidak melakukan perencanaan secara manual karena sudah disediakan aplikasi, jadi kita tinggal memasukkan data di sistem tersebut dan bisa terkontrol”(Wawancara pada tanggal 12 Mei 2023)

Hal ini juga disampaikan oleh Mbak Pinastika selaku Analis Data dan Informasi DPMPTSP Kota Yogyakarta. Berikut kutipan wawancaranya:

“Pastinya dengan adanya SIPD ini kita dapat menghemat waktu dek, kita tidak perlu melakukan mobilitas lebih dalam menyampaikan dokumen kepada BPKAD, karena semua dapat diselesaikan secara lebih efisien melalui SIPD”(Wawancara pada tanggal 09 Mei 2023)

Dengan demikian, SIPD tidak hanya mempermudah akses dan pengelolaan data, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi waktu dalam pelaksanaan tugas terkait pengelolaan keuangan. Manfaat lain terkait penerapan SIPD juga disampaikan oleh Ibu Bibit selaku bendahara DPMPTSP Kota Yogyakarta sebagai berikut :

“Saya merasa, keberadaan aplikasi SIPD telah meningkatkan tata kelola keuangan menjadi lebih baik. Dengan adanya SIPD, saya dapat melakukan fungsi kontrol terhadap semua belanja yang telah dicairkan menjadi lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Meskipun prosedurnya memakan waktu ekstra, namun jika dilakukan dengan disiplin dan bersungguh-sungguh, hasilnya juga akan tepat waktu dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, SIPD dapat memberikan dukungan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan”(Wawancara pada tanggal 13 Mei 2024)

Kehadiran SIPD telah memberikan perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah. SIPD tidak hanya membantu pada efisiensi pengelolaan keuangan daerah tetapi juga meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam proses perencanaan anggaran. Kepuasan pengguna tercapai ketika sistem informasi secara efisien membantu pengguna dalam pekerjaan mereka. Hal ini terlihat dari kemampuan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam memberikan solusi yang efisien terhadap pekerjaan dan tugas-tugas pengguna. Oleh karena itu, efisiensi suatu sistem informasi dapat dinilai dari sejauh mana tujuan pengguna dapat tercapai melalui langkah-langkah yang tepat (DeLone & McLean, 2003).

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa indikator manfaat bersih telah terpenuhi dengan baik. Penerapan SIPD telah berhasil meningkatkan produktivitas pengguna. Proses pengelolaan data perencanaan anggaran menjadi lebih cepat karena semua informasi

telah terintegrasi secara sistematis dalam sistem. Selain itu, dari segi efisiensi, dengan adanya SIPD mampu memaksimalkan proses perencanaan anggaran dengan mengurangi mobilitas, biaya, dan waktu. Kehadiran SIPD telah meningkatkan tata kelola keuangan daerah secara signifikan, proses perencanaan anggaran menjadi lebih sederhana dan mudah.

Ucapan Terima Kasih

1. Ibu Eva Hany Fanida, S.AP., M. AP selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan.
2. Ibu Dra. Meirinawati, M.AP. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
3. Bapak Trena Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP selaku dosen penguji yang juga memberikan dan masukan kepada penulis.
4. Seluruh pihak yang telah bersedia untuk mendukung dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sudah berjalan cukup efektif. Karena meskipun sudah memenuhi kriteria aspek keberhasilan sistem informasi berdasarkan teori keberhasilan sistem informasi oleh William H. Delone dan Ephraim R. McLean (2016). Namun, pada indikator kualitas sistem masih ditemukan kendala dan error pada sistem selama proses penganggaran. Selain itu, kinerja server yang belum optimal juga menjadi hambatan yang mengganggu kelancaran aktivitas pengguna dan waktu respon dari sistem dinilai masih belum memuaskan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dimiliki peneliti terkait efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Berikut merupakan saran yang dapat diberikan:

1. Diperlukan perbaikan pada server SIPD. Hal ini dikarenakan masih sering terjadi kendala atau error sistem selama proses penganggaran. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan serta server menjadi suatu keharusan untuk memastikan kepuasan pengguna saat mengakses dan menggunakan sistem. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat

meningkatkan kelancaran operasional di lingkungan DPMPSTSP Kota Yogyakarta.

2. Senantiasa melakukan pembaharuan dan perbaikan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna yang terus berubah serta untuk meningkatkan kualitas sistem.
3. Menyediakan akses internet secara khusus untuk penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan terhadap stabilitas jaringan atau koneksi internet yang terkadang masih kurang stabil saat digunakan.
4. Melakukan bimbingan teknis secara teratur kepada seluruh operator SIPD DPMPSTSP Kota Yogyakarta agar operator lebih memahami cara mengoperasikan SIPD dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Wibowo. (2006). Kajian Tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM).
- Bendoly, E & Swink, M. 2007. Moderating Effects of Information Access on Project Management Behavior, Performance and Perceptions. *Journal of Operations Management*, Vol. 25 pp. 604–622
- Delone, W. H., & Mclean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. In *Information Systems Research*, *Journal of Management Information Systems* (Vol. 19, Issue 4).
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2016). Information Systems Success Measurement. *Foundations and Trends® in Information Systems*, 2(1), 1–116. <https://doi.org/10.1561/2900000005>
- Heidmann, Marcus. 2008. *The Role of Management Accounting Systems in Strategic Sensemaking*. Germany : Respect Copyright Encourage Creativity.
- Jogiyanto, H.M. (2007). *Model Kesuksesan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kementrian Dalam Negeri. <https://www.kemendagri.go.id>. Diakses pada 25 November 2022
- Leonardo, A. (2015). *Pengaruh Kualitas Software, Akurasi Informasi, Ketepatan Waktu Informasi, Dan Relevansi Informasi Terhadap Kepuasan End-User Sistem Informasi Akuntansi (Studi Empiris pada Karyawan Perusahaan Retail Departement Store Wilayah Jakarta)* (Vol. 7, Issue 2). Desember.
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152–158.
- <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>
- Mohamadali, N. A. & Aziz, N. F. A., 2017. The Technology Factors as Barriers for Sustainable Health Information Systems (HIS) – A Review. Elsevier B.V, pp. 370-378.
- Nisa, K. (2016). *Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Siadpaplus) Melalui Aplikasi Audio To Text Recording Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. <http://www.radarmalang>.
- Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p68-79>
- Riskika Analdo Yoga Dwi, & Meirinawati. (2022). *Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Layanan Simpatik Di Kabupaten Kediri: Studi Kasus Izin Mendirikan Bangunan*.
- Syafriyani Ida, & Zaituna Yuli Putri. (2018). Penerapan E-government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi di BKPSDM Kabupaten Sumenep. *JPSI (Journal of Public Sector Innovation)*, 3(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sinungan. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). *The public value of E-Government – A literature review*. In *Government Information Quarterly* (Vol. 36, Issue 2, pp. 167–178). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>
- Tjiptono. 2018. *Strategi Pemasaran*, Edisi ke 4. Yogyakarta : Andi.
- Urbach, N. & Mueller, B., 2011. The Update Delone and Mclean Model of Information System. Springer Science and Business Media, p. 28.
- Wibowo, A. (2006). *Kajian Tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam)*
- Warsono, H., Desti, R., Qurniawati, H., Sitorus, S., & Mukhammad, F. S. (2018). *Inovasi Layanan Mpospay Dan Free Pick Up Pos Indonesia Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan (Studi Pada Kantor Pos Semarang 50000)*. In *Journal of Public Sector Innovations* (Vol. 2, Issue 2).
- Zunaidi, Makhbuh, Dwi, E.W., & Dewi, A., 2011. “Analisis Pengaruh Akurasi, Ketepatan Waktu, dan Relevansi Informasi Terhadap Kepuasan Pemakai Sistem Informasi ATEMIS on WEB di PT. TELKOM MSC Area IV Jawa Tengah dan DIY”. Yogyakarta.

